

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Catatan atas Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, ditetapkan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 1.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja

- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, dan PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Pengelolaan sumber daya air secara makro diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, air baku, konservasi sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, agar pengelolaan sumber daya air dapat berkelanjutan, terpadu, menyeruluh dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya air yang ada antara lain meliputi sungai sebanyak 202 buah dan panjang 4.116,89 km. Wilayah sungai berdasarkan peraturan Menteri PURP Nomor 04/PRT/M/2015 tentang criteria dan penempatan wilayah sungai kewenangan pusat (WS Cimanuk Sungai; dimana 6 wilayah Sungai Kewengan Pusat (WS Cimanuk Cisanggarung, WS Serayu Bogowonto dan WS Citanduy), 2 Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten Jepara (WS Wiso Gelis dan WS Karimunjawa). Terdapat Bendungan Besar, Bendungan Alam, Bendungan Kecil sebanyak 41 buah. Untuk jaringan irigasi, dan keseluruhan luas 978.527 Ha pada 12.315 Daerah Irigasi (DI), seluas 86.865 Ha pada sejumlah 108 DI menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kewenangan Pusat seluas 347.674 Ha pada 33 DI dan kewenangan kabupaten/kota seluas 543.988 Ha pada 12.147 DI.

Bidang Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang optimal untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah.

Sampai dengan Tahun 2020, telah dilaksanakan pembahasan terhadap 21 revisi RTRW Kabupaten/Kota serta 2 penyusunan RDTR (Kota Salatiga dan kota Purwokerto). Dari 21 revisi RTRW tersebut 2 telah menjadi Perda Baru yaitu Perda Baru yaitu Perda RTRW Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pematang, 13 Kabupaten/Kota telah mendapatkan rekom namun masih berproses dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan persetujuan substansi.

Adapun gambaran pengelolaan kegiatan secara makro yang dilaksanakan dalam tahun 2020 dengan jumlah total APBD sebesar Rp.142.823.696.000,- dengan realisasi Anggaran yang terlaksana untuk kegiatan sebesar Rp. 130.508.424.719,-.

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, dan untuk menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

NC	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan
				Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7
51	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Da	46.200.000	45.738.000	100,00	99	
52	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Da	18.490.000	18.215.945	100,00	98,52	
53	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	2.600.000	2.585.000	100,00	99,42	
54	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	1.000.000	996.000	100,00	99,6	
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Ka	48.750.000	46.561.075	100,00	95,51	
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Peran	37.616.000	37.372.000	100,00	99,35	
57	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	22.818.000	22.596.500	100,00	99,03	
58	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	132.000.000	98.352.209	100,00	74,51	
59	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Da	30.000.000	27.600.000	100,00	92	
60	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Da	30.330.000	30.330.000	100,00	100	
61	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	8.380.000	8.290.000	100,00	98,93	
62	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	1.129.000	1.050.000	100,00	93	
63	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Ka	82.681.000	81.212.400	100,00	98,22	
64	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Peran	44.853.000	43.652.700	100,00	97,32	
65	Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA	1.238.089.000	1.223.288.395	100,00	98,8	
66	Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA	491.482.000	490.001.200	100,00	99,7	
67	Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA	2.648.973.000	2.515.427.389	100,00	94,96	
68	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi	11.277.796.000	1.805.089.047	100,00	16,01	
69	Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	439.961.000	439.438.755	100,00	99,88	
70	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana	178.913.000	173.144.346	100,00	96,78	
71	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana	65.337.000	65.157.325	100,00	99,73	
72	Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA	715.367.000	713.876.350	100,00	99,79	
73	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai	1.438.145.000	1.407.556.900	100,00	97,87	
74	Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana	422.296.000	418.238.100	100,00	99,04	
75	Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan	3.366.400.000	3.312.487.290	100,00	98,4	
76	Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	308.200.000	166.938.780	100,00	54,17	
77	Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota	287.140.000	234.283.530	100,00	81,59	
78	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	510.852.000	410.208.034	100,00	80,3	
79	Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	586.213.000	559.641.795	100,00	95,47	
80	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku B	6.816.182.000	6.755.071.850	100,00	99,1	
81	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai P	1.444.435.000	1.438.105.800	100,00	99,56	
82	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal	852.389.000	850.339.800	100,00	99,76	
83	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal	859.070.000	857.166.600	100,00	99,78	
84	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	78.468.000	77.824.750	100,00	99,18	
85	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku B	5.167.528.000	5.132.647.550	100,00	99,33	
86	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai P	1.475.177.000	1.454.384.200	100,00	98,59	
87	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto	711.465.000	702.984.900	100,00	98,81	
88	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto	766.126.000	749.423.009	100,00	97,82	
89	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	92.791.000	92.552.050	100,00	99,74	
90	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku B	4.351.184.000	4.347.054.550	100,00	99,91	
91	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai P	547.870.000	546.764.050	100,00	99,8	
92	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna	585.621.000	585.104.750	100,00	99,91	
93	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna	611.782.000	610.318.400	100,00	99,76	
94	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna	52.524.000	52.151.800	100,00	99,29	
95	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku B	6.686.629.000	6.351.155.300	100,00	94,98	
96	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai P	504.468.000	481.501.800	100,00	95,45	
97	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo	581.862.000	579.840.950	100,00	99,65	
98	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo	447.989.000	428.521.800	100,00	95,65	
99	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	49.764.000	49.608.650	100,00	99,69	
100	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku B	3.086.796.000	3.033.758.281	100,00	98,28	
101	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai P	571.137.000	570.233.000	100,00	99,84	
102	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo	590.873.000	590.156.949	100,00	99,88	
103	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo	487.656.000	480.853.795	100,00	98,61	
104	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo	51.369.000	51.138.497	100,00	99,55	
105	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku B	4.122.853.000	4.078.074.275	100,00	98,91	

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
PROVINSI : Jawa Tengah

NO	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan
				Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.206.640.000	1.119.470.348	100,00	92,78	
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	54.574.000	52.502.722	100,00	96,2	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	605.000.000	510.330.426	100,00	84,35	
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	194.700.000	184.569.000	100,00	94,8	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	1.685.780.000	1.877.887.108	100,00	99,58	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	162.080.000	153.111.080	100,00	94,47	
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	14.700.000	14.525.000	100,00	98,81	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	3.830.000	3.740.000	100,00	97,65	
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah	428.920.000	420.359.550	100,00	98	
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	277.942.000	270.307.400	100,00	97,25	
11	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	185.000.000	184.049.000	100,00	99,49	
12	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	72.240.000	71.107.000	100,00	98,43	
13	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	543.326.000	486.916.550	100,00	89,62	
14	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	28.515.000	25.137.704	100,00	88,16	
15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.854.000	161.971.632	100,00	95,92	
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.755.000	188.990.348	100,00	99,6	
17	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	29.260.000	29.107.500	100,00	99,48	
18	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	206.904.000	142.152.937	100,00	68,7	
19	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	34.500.000	34.500.000	100,00	100	
20	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	12.420.000	12.038.124	100,00	96,93	
21	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	2.300.000	2.300.000	100,00	100	
22	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100,00	100	
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah	167.410.000	166.536.025	100,00	99,48	
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	36.468.000	36.171.000	100,00	99,19	
25	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	13.396.000	13.166.050	100,00	98,28	
26	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	166.984.000	141.784.398	100,00	84,91	
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	78.188.000	76.728.000	100,00	98,13	
28	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	7.450.000	7.275.000	100,00	97,65	
29	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	7.100.000	7.000.000	100,00	98,59	
30	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	942.000	942.000	100,00	100	
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah	94.880.000	94.651.375	100,00	99,76	
32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	62.507.000	62.458.100	100,00	99,92	
33	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	15.389.000	15.382.200	100,00	99,96	
34	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	147.000.000	132.267.690	100,00	89,98	
35	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	45.600.000	45.540.000	100,00	99,87	
36	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	8.350.000	8.140.000	100,00	97,49	
37	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	5.400.000	5.375.000	100,00	99,54	
38	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	1.355.000	1.300.000	100,00	95,94	
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah	114.351.000	110.539.925	100,00	96,67	
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	31.848.000	31.817.500	100,00	99,9	
41	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	11.877.000	11.797.000	100,00	99,33	
42	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	169.400.000	110.405.406	100,00	65,17	
43	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	33.000.000	33.000.000	100,00	100	
44	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	13.700.000	13.695.400	100,00	99,97	
45	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	2.700.000	2.670.000	100,00	98,89	
46	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	600.000	556.000	100,00	92,67	
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah	99.735.000	96.393.175	100,00	96,65	
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	26.580.000	26.200.500	100,00	98,57	
49	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	16.637.000	16.479.500	100,00	99,05	
50	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	110.000.000	81.331.194	100,00	73,94	

NO	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan
				Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7
06	Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai P	257.793.000	255.014.300	100,00	98,92	
07	Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy	705.672.000	699.327.900	100,00	99,1	
08	Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy	663.531.000	650.322.250	100,00	98,01	
09	Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	51.390.000	50.658.400	100,00	98,58	

Semarang, 30 Desember 2020

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1
NIP. 19640601 199302 1 002

Bendahara Pengeluaran

(KUSTIYARTINI, SE, M.Si)
NIP. 19690405 199101 2 002